

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986.
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2001.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Candra Muzaffar dkk., *Human's wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djoko Prakoso, *Masalah ganti Kerugian dalam KUHAP*, Jakarta: Bina, 1987.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- J. E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan*, Surabaya: Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1979.
- Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Lawrence M. Freidman, *Law and Society an Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1977.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.

- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1992.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- \_\_\_\_\_, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, dalam: Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- P.A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2000.
- Paul SinlaEloe, *“Tindak Pidana Perdagangan Orang”*, Malang: Setara Press, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Pradjoko Midjari, *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang kesejahteraan Rakyat, 2002.
- Purwoto S. Gandasubrata, *Masalah Ganti Rugi dalam Perkara Pidana*, Bandung: 1977.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1976.
- R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- R.E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2000.
- Rene Yulia, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Roscoe Pond, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bharata, 1978.
- S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alumni, 1989.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Surabaya: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sunaryati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni, 1976.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 2004.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

#### **Skripsi/Tesis/Jurnal/Bahan Kuliah/Kamus/Ensiklopedia**

- ACILS-IMC-USAID, *Panduan Penanganan Anak Korban Perdagangan Manusia*, Lembaga Advokasi Hak Anak, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pikiran (ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*, yang telah disadur penulis dari tulisan Sapto Budoyo, Semarang, 2006.
- Buku Saku Identifikasi dan Panduan Penyediaan Layanan Korban TPPO Bagi Petugas Garda Depan di Kota Batam, Jakarta.
- Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan R.I. (Pusdiklat).
- Francis T. Miko, *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, Artikel, Jakarta: Progressia.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Person di Indonesia Tahun 2003-2004*, Jakarta, 2004.

Kontras, *Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law*, Human Rights Resolution 2005/35, *Negara Wajib Pulihkan Korban*.

Lilik Mulyadi, dalam Makalah H. Muchsin, *Peranan Putusan Hakim pada Keeratan dalam Rumah Tangga*, *Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No.260*, Juli 2006, Jakarta: Ikahi, 2007.

Mardjono Reskodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

Radhika Ceomaeaswarny, *Mengenali perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan*, *Makalah pada Seminar Komnas Perempuan*, Surabaya, 2002.

Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, Artikel, *Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, 1992.

Sondang Kristine, *Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 163/Pid.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi)*, Thesis, Program Magister Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, *Masukan Terhadap Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.

Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Jakarta: ESLAM, 2002.

Tri Hermintadi, *Bahan Makalah Kepentingan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Dari Sudut Pandang Viktimologi*.

Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktik Kompensasi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 2007.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*), Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1984 oleh Presiden Soeharto, Diundangkan pada tanggal 24 Juli 1984 di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, diundangkan pada tanggal 23 September 1999 di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006 di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635. Terdiri dari VII BAB, 46 Pasal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2018 oleh Presiden Joko Widodo, diundangkan pada tanggal 5 Maret 2018 di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184.

#### **Internet**

<http://eprints.undip.ac.id>. Diakses pada tanggal 27 September 2018.

<http://www.kontras.org/buku/bagian%20II%20priok.pdf>, diakses tanggal 27 September 2018

Pusat Litbang Kejaksaan Republik Indonesia, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkaitan dengan Perlindungan Hak-hak Korban*, Laporan Penelitian, dipublikasikan dalam [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&id=48](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&id=48), diakses tanggal 5 Desember 2018

Stephen Schafer dalam Zul Akrial, <http://zulakrial.blogspot.com/2012/09/dasarpembenaran-konsep-restitusi.html>, diakses pada tanggal 27 September 2018.

US, Department of Justice, Office of Justice Programs, *Office for Victims of Crime*, "Ordering Restitution to the Crime Victim, [www.ovc.gov/publications/bulletins/legalseries/bulletin6/ncj189189.pdf](http://www.ovc.gov/publications/bulletins/legalseries/bulletin6/ncj189189.pdf) dalam Herlambang, *Uang Pengganti: Ganti Kerugian atau Denda Alternatif Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Kutei, Fakultas Universitas Bengkulu, Nomor 1 (1) April 2012*.

### **Wawancara**

Bapak Irwan Setiawan selaku Direktur Yayasan Embun Pelangi. Yayasan Embun Pelangi

Iptu Drefani Diah Yunita, S.Ik. selaku Kepala Unit Penyelidik 6 Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Barelang

Ipda Lesly Deiby Lihawa, S.H., M.H. selaku Kepala Unit 1 Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

Bapak Pilfan Fajar Dermawan, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batam beserta 2 (dua) orang Jaksa Fungsional yaitu Ibu Rumondang, S.H. dan Ibu Nani Herawati, S.H.

Bapak Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Batam

Bapak Achmad Soleh, S.Ip. selaku Kepala Sub Bagian Layanan Bantuan Restitusi